

Judul : Cari potensi efisiensi panja kaji usulan kenaikan biaya haji
Tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cari Potensi Efisiensi

Panja Kaji Usulan Kenaikan Biaya Haji

SENAYAN menyuaroti usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp 107,34 juta per jemaah, naik hampir Rp 20 juta dibandingkan BPIH 2026 sebesar Rp 87,4 juta/jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR Hefifah Syaifuddin mengatakan, kenaikan BPIH 2027 tidak dapat diterima begitu saja tanpa melihat secara rinci kebutuhan, kewajiban, dan potensi efisiensi pada setiap komponen pembiayaan. Karena itu, Panitia Kerja (Panja) Haji yang baru dibentuk Komisi VIII DPR akan mendalami setiap komponen pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kenaikan ini akan kita bedah satu per satu. Mulai dari nilai tukar, pembungkusan akomodasi, transportasi, sampai layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Setiap rupiah kenaikan itu mesti rasional dan benar-benar terasa manfaatnya bagi jemaah," tegas Hefifah di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Sebelumnya, Menteri Agama dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan kenaikan BPIH 2027 sebesar 10 hingga 15 persen. "Usulan BPIH tahun 2027 sebesar 107.340.172,02 rupiah per jemaah atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806,57 rupiah," kata Irfan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Hefifah melanjutkan, Panja juga akan mendalami perubahan skema pembiayaan yang diusulkan untuk 2027. Komposisi pembiayaan yang pada 2026 terdiri atas 62 persen biaya langsung jemaah dan 38

persen nilai manfaat, diusulkan berubah menjadi 40 persen biaya jemaah dan 60 persen Nilai Manfaat pada 2027.

Yang pasti, ia ingin biaya yang dibayar jemaah haji 2027 makin terjangkau. Namun, upaya memangkas biaya yang dibayarkan jemaah yang berangkat tidak boleh mengurangi keberlanjutan dana haji yang juga menjadi hak jutaan jemaah yang masih berada dalam antrian.

Hefifah mendukung Panja Haji menguji berbagai skenario pembiayaan sekaligus mencari ruang efisiensi, terutama pada komponen biaya terbesar. Pembahasan BPIH nantinya mampu mempertemukan kepentingan jemaah yang akan berangkat dengan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.

"Target kita bukan cari haji termurah, tapi biaya yang wajar, pelayanan yang makin baik, adil untuk yang masih menunggu, dan keuangan haji yang tetap sehat," kata politisi Golkar ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid meminta waktu pelunasan BPIH 2027 diperpanjang hingga lima bulan. Tujuannya agar calon jemaah haji memiliki waktu yang lebih panjang dan longgar dalam mempersiapkan pelunasan biaya haji.

"Tapi perpanjangan masa pelunasan hingga lima bulan membutuhkan persiapan penyelenggaraan haji yang dimulai lebih awal," ujar Wachid di Jakarta, Kamis (20/8/2026). ■ TIF